

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK

Halaman 22

Opsi Terakhir Gaji KONI

Sebanyak 104 karyawan Komite Olahraga Nasional Indonesia mengadukan penderitaan hidup akibat lima bulan tak menerima gaji kepada Kemenpora. Solusi alternatif pun mulai dirancang.

JAKARTA, KOMPAS — Komite Olahraga Nasional Indonesia gagal memutar roda organisasi. Masalah tunggakan gaji 104 karyawan pun tak menemukan solusi hingga lima bulan ini. Para karyawan tak kuasa lagi menahan penderitaan hidup dan mengadukan nasib mereka ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senin (13/5/2019).

Kemenpora, dengan alasan kemanusiaan, akan merancang solusi alternatif untuk membayar gaji karyawan KONI. Sumber dana akan diambil dari pos anggaran bantuan administrasi Kemenpora ke KONI.

Namun, solusi ini masih harus dikaji oleh Inspektorat Kemenpora supaya tidak menjadi pelanggaran hukum. Selain itu, solusi ini juga perlu persetujuan Menpora Imam Nahrawi.

Sebanyak 43 perwakilan karyawan KONI mengadukan nasib mereka kepada Kemenpora yang diwakili Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto.

Pemimpin perwakilan karyawan sekaligus Kepala Bagian Tata Usaha KONI, Hariyanto, menceritakan penderitaan hidup 104 karyawan yang sudah lima bulan tak menerima gaji.

Sekitar tiga bulan ini, ujar Hariyanto, banyak karyawan yang sudah tidak bisa membayar iuran sekolah anak-anaknya, tidak bisa membayar iuran listrik dan air, serta sejumlah kredit. Tak sedikit karyawan harus berutang sana-sini.

Ada pula karyawan yang mencoba kerja sampingan, antara lain menjadi tukang ojek. "Bahkan, tak sedikit karyawan yang rumah tangganya di ujung tanduk karena situasi ini. Setiap hari mereka ribut dengan pasangan masing-masing karena tak kunjung ada kepastian mengenai kapan gaji tersebut diterima," ujar Hariyanto.

Karyawan KONI, Rais Supriadi, mengatakan, dirinya sudah tiga bulan tidak sanggup membayar iuran sekolah anak-

nya, dua bulan tidak membayar iuran listrik dan air, serta tidak membayar tagihan kredit. Ia berulang kali memohon belas kasih dari para penagih utang agar diberi kelonggaran.

"Untuk makan sehari-hari, saya mengemis mencari pinjaman dari sanak keluarga dan kenalan. Namun, saya tidak mungkin terus begini," kata Rais dengan mata berkaca-kaca dan suara bergetar.

Rais sangat memohon bantuan dari Kemenpora, lembaga yang menaungi mereka. "Bagaimanalah perasaan ini kalau sampai hari raya (Idul Fitri) tiba kami belum menerima gaji. Rasanya sudah seperti nangis kebo, tidak mengeluarkan air mata, tetapi hati rasanya hancur sekali," ujarnya.

Solusi alternatif

Tunggakan gaji karyawan KONI itu terjadi setelah sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI terjerat operasi tangkap

tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir 2018. Kasus dugaan suap dan korupsi itu terkait dana hibah Kemenpora ke KONI.

"Setelah terjadi OTT lalu, kami tidak ingin lagi memberikan bantuan yang ujung-ujungnya bermasalah hukum. Lagi pula masih banyak kegiatan KONI Pusat yang belum tuntas laporan pertanggungjawabannya dan telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang sedang melakukan pemeriksaan di Kemenpora," ujar Gatot.

Namun, lanjut Gatot, keluhan karyawan KONI akan dilaporkan ke Menpora. "Dengan alasan kemanusiaan, kami akan mengupayakan cara alternatif untuk membantu karyawan KONI. Mudah-mudahan, dalam sepekan ini, ada kepastian dari Menpora maupun Inspektorat Kemenpora. Yang jelas, kami ingin membantu, tetapi juga tidak ingin tersandung hukum," tuturnya.

Asisten Deputi Bidang Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dari Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Herman Chaniago menjelaskan, selain anggaran pengawasan dan pendampingan yang biasa digunakan KONI untuk operasional organisasi, ada dua lagi pintu anggaran dari Kemenpora untuk KONI. Dua pos anggaran itu adalah anggaran peningkatan kapasitas dan bantuan kegiatan, serta bantuan administrasi.

Dari dua pintu tersisa, anggaran bantuan administrasi bisa menjadi solusi alternatif membayar gaji karyawan KONI. Dalam anggaran bantuan administrasi, ada poin untuk membayar honor petugas sekretariat. Dengan alasan kemanusiaan, upaya tersebut diharapkan bisa dilakukan.

"Namun, cara ini juga harus menunggu persetujuan Menpora dan kajian Inspektorat Kemenpora," ucap Herman. (DRI)